

**Laporan Program Perencanaan
dan Perancangan Arsitektur (LP3A)**

**“GEDUNG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) DI KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG”**



Oleh :

RYZKA BUDI SANTOSO

201003232010485

Dosen Pembimbing I :

Dr. Ars. Eko Nursanty ST. MT.

Dosen Pembimbing II :

Djudjun Rusmlatmoko. ST. Mars.

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

"GEDUNG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN KEUANGAN DI KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG"

Oleh:

RYZKA BUDI SANTOSO
NIM 201003232010485

Laporan LP3A ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Semarang, 7 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. Ars. Ello Kusantv ST, MT.

Pembimbing II



Djudjun Rusmiatmoko ST, M.Ars.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Arsitektur



I Wayan Andhika, ST, M. Ars

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Tujuan dan Sasaran	14
1.3. Manfaat	14
1.4. Alur Pikir	15
1.5. Ruang Lingkup.....	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN UMUM	17
2.1. Pengertian Judul.....	17
2.2. Persyaratan Teknis dan Non Teknis Bangunan Gedung.....	20
2.3. Jenis Kegiatan yang Diakomodasi.....	23
2.4. Kaitannya Dengan Lingkup Provinsi.....	24
2.5. Perbedaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	26
2.6. Karakteristik Spesifik Bangunan.....	29
BAB III.....	32
STUDI BANDING	32
3.1. Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	32
3.1.1. Jenis Kegiatan	33
3.1.2. Pelaku Kegiatan.....	34
3.1.3. Struktur Bangunan.....	34
3.1.4. Utilitas Bangunan.....	35
3.1.5. Pembagian Ruang.....	36

3.1.6.	Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang	38
3.1.7.	Gaya Arsitektural Bangunan.....	44
3.1.	Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.....	45
3.1.1.	Jenis Kegiatan	45
3.1.2.	Pelaku Kegiatan.....	46
3.1.3.	Struktur Bangunan.....	47
3.1.4.	Utilitas Bangunan.....	48
3.1.5.	Pembagian Ruang.....	48
3.1.6.	Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang	50
3.2.7.	Gaya Arsitektur Bangunan	54
3.3.	Kesimpulan Studi Banding.....	56
3.3.1.	Matriks Studi Banding.....	56
3.3.2.	Kesimpulan Studi Banding.....	58
BAB IV	61
TINJAUAN KHUSUS	61
4.1.	Tinjauan Umum Kota Pangkalpinang.....	61
4.1.1.	Kondisi Geografis Kota Pangkalpinang.....	61
4.1.2.	Kondisi Topografi Kota Pangkalpinang	62
4.1.3.	Klimatologi Kota Pangkalpinang.....	62
4.1.4.	Tata Guna Lahan Kota Pangkalpinang	62
4.1.5.	Kondisi Kependudukan Kota Pangkalpinang	69
4.2.	Tinjauan Khusus Gedung Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pangkalpinang	71
4.2.1.	Pengertian Gedung Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pangkalpinang	71
4.2.2.	Tugas, Fungsi, dan Wewenang.....	75
4.2.3.	Pelaku, Aktivitas dan Ruang Gedung Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pangkalpinang.....	78
4.2.4.	Analisis Lokasi Tapak Perancangan Gedung BPKP Pangkalpinang.....	83
4.2.5.	Topografi dan Morfologi.....	84
4.3.	Tinjauan Peraturan Daerah (PERDA) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 – 2030.	84

4.4. Tinjauan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).....	86
BAB V	88
KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN	88
5.1. KESIMPULAN.....	88
5.2. BATASAN.....	88
5.3. ANGGAPAN	89
BAB VI	90
PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR	90
6.1. Pendekatan Aspek Dasar	90
6.2. Pendekatan Fungsional.....	90
6.3. Pendekatan Kegiatan	91
6.4. Pendekatan Dasar Perencanaan	91
6.4.1. Pendekatan Pelaku Kegiatan.....	91
6.4.2. Pendekatan Jenis Kegiatan dan Kelompok Kegiatan	92
6.4.3. Pendekatan Kebutuhan Ruang.....	93
6.4.4. Pendekatan Hubungan Ruang.....	94
6.4.5. Pendekatan Kapasitas Pengguna.....	96
6.4.6. Pendekatan Standar Besaran Ruang	98
6.5. Kriteria Penentuan Lokasi	104
6.5.1. Pendekatan kriteria Tapak	104
6.5.2. Alternatif Lokasi Tapak.....	105
6.5.3. Penentuan Tapak	108
6.6. Pendekatan Sistem Bangunan.....	109
6.6.1. Pendekatan Sistem Stuktur.....	109
6.6.2. Pendekatan Sistem Pencahayaan	110
6.6.3. Pendekatan Sistem Penghawaan.....	110
6.6.4. Pendekatan Sistem Sirkulasi.....	112
6.6.5. Pendekatan Sistem Utilitas	114
6.7. Pendekatan Ragam Arsitektur.....	124
6.7.1. Pendekatan Arsitektur	124
6.7.2. Pendekatan Desain	125
BAB VII	135

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR	135
7.1. Konsep Dasar Perencanaan	135
7.1.1. Konsep Filosofi Dasar	135
7.1.2. Konsep Bangunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	135
7.1.3. Konsep Penekanan Desain	136
7.2. Persyaratan Perancangan	136
7.2.1. Struktur	136
7.2.2. Utilitas	137
7.2.3. Penataan Ruang Luar	138
7.2.4. Penataan Tapak	138
7.3. Program Perancangan	139
7.3.1. Program Ruang	139
7.3.2. Perhitungan Luas Tapak	144
7.1.1. Tapak Terpilih	146
DAFTAR PUSTAKA	147

BAB VII

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

7.1. Konsep Dasar Perencanaan

7.1.1. Konsep Filosofi Dasar

Secara umum konsep dasar perancangan Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Pangkalpinang direncanakan sebagai bangunan yang memiliki filosofi dan karakter sesuai dengan fungsi dari bangunan tersebut, yaitu :

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Pangkalpinang merupakan bangunan pemerintahan yang menitikberatkan pada pengawasan keuangan dan pembangunan. Sebagai badan pemerintah yang berfungsi pengawasan diharapkan mampu menampilkan karakter dalam tampilan bangunan dalam representasi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Ekspresi arsitektural ini diwujudkan dalam perencanaan fisik (penataan ruang dalam dan ruang luar bangunan dengan menggunakan arsitektur neo vernacular.

7.1.2. Konsep Bangunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Terdapat standar perancangan dalam Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan menjadi landasan perancangan secara sistematis. Kriteria yang menjadi acuan perancangan diantaranya sebagai berikut :

- Perancangan gedung BPKP merupakan tujuan utama dari perencanaan gedung
- Perencanaan gedung akan disesuaikan dengan penentuan aksesibilitas kawasan, sirkulasi, bentuk tatanan ruang dan lain sebagainya
- Peranan ruang terbuka hijau dalam perencanaan gedung sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Penggunaan tanaman – tanaman yang berfungsi sebagai peneduh diutamakan sehingga dapat
- menciptakan kawasan yang sejuk dan nyaman. Tanaman pengarah dan perdu digunakan sebagai pemberi kesan visual kawasan
- Penataan parkir dan sirkulasi kawasan ditunjukkan untuk menjaga kerapian dan menghindari terjadinya cross circulation antara